

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan (BAPENDA) Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran Perubahan 2024 dan sebagai review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Melalui Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terkait dengan Rencana Kerja BAPENDA dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sukabumi.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA ini belum sempurna, oleh karena itu kami terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif. Terimakasih.

Palabuhanratu, Agustus 2024

KEPALA,



HERDY SOMANTRI SUBANDI, S.IP.,M.Si

Pembina ,IV/a

NIP. 19800425 200801 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKA DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ...	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	II-19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD	II-22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 s.d Triwulan II.....	II-8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024..	II-8
Tabel 2.3	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2024 s.d Tw.II	II-16
Tabel 2.4	Realisasi Kinerja SKPD 2021-2023 dan proyeksi 2024	II-19
Tabel 2.5	Rekapitulasi Pagu per Program/Kegiatan	II-22
Tabel 2.6	Usulan Program/ Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2024	II-23
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran BAPENDA	III-2
Tabel 3.2	Strategi dan Kebijakan BAPENDA	III-3
Tabel 4.1	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 2024.....	IV-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Renja	I-2
------------	-----------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2024 Perubahan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021– 2026. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Perubahan merupakan penjabaran dari Renstra BAPENDA. Program dan Kegiatan yang ada di Renja BAPENDA tercantum dalam Renstra BAPENDA yang selanjutnya menjadi dasar/ pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Perubahan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Perangkat Daerah (PD) diwajibkan mempunyai Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai Rencana pelaksanaan kegiatan Tahunan yang tertuai dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5 tahun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi, dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11) adalah Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Perangkat Daerah hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstra) untuk periode 5 Tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap Tahun dalam bentuk Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah melalui proses mulai dari persiapan, pendataan, pengolahan analisa, telaahan, hingga penyusunan yang menjadi Rancangan Kerja PD (RKPD). Berikut bagan alir penyusunan Renja Perubahan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renja



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Perubahan diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20110 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD)

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 7, Tambahan Lembaran Daerah No 236);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 8/192/2021);
 47. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 94).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Perubahan adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 Perubahan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Sebagai pedoman Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengendali kegiatan di Bapenda agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Perubahan adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat pengertian Renja PD sesuai Renstra PD proses penyusunan Renja PD, Penjelasan tentang peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. Maksud dan tujuan disusunnya Renja PD. Serta sistematika Renja PD menurut Pasal 143 Permendagri 54 Tahun 2010.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pada Bab ini mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sampai triwulan II, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/ kegiatan Renstra PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi terpilih sesuai Renstra Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan 2024 Perubahan beserta pendanaannya

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan catatan penting pelaksanaan rancangan Rencana Kerja (Renja).

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan baik dalam RPJPD RPJMD maupun Renstra BAPENDA Tahun 2021-2026. Salah satu Isu Strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah “Reformasi Birokrasi”. Secara Singkat Reformasi Birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan Aparatur berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7); sesuai dengan Pasal 4 huruf e, nomor 3 dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilanjutkan dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hal tersebut mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Nomer 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Bapenda yang terdiri dari:

BAPENDA menurut Pasal 4 ayat (1) bahwa BAPENDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan Daerah.

BAPENDA menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendataan, penagihan dan pengendalian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang pendataan, penagihan dan pengendalian; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang pendataan, penagihan dan pengendalian; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
- e. pembinaan Administrasi di Lingkungan Badan.
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah;
- g. pembinaan pelayanan publik di lingkungan Badan pendapatan Daerah;
- h. pembinaan terhadap pengelola pendapatan asli daerah dan wajib pajak;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi BAPENDA terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Koordinator Verifikasi.
- d. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan;
 3. Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan.
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
 3. Sub Koordinator Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang:

1. Sekretariat,

Tugas Pokok : melaksanakan fungsi Badan di bidang kesekretariatan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, Perencanaan dan evaluasi;
- c. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di lingkungan Badan;
- e. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
- f. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- g. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
- h. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
- i. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- j. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
- k. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan pengendalian;
- b. pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian; pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan: pendataan Sub Koordinator pelayanan dan pendataan, sub bidang verifikasi, sub bidang penetapan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang perencanaan dan pengendalian; sub bidang perencanaan dan pengembangan, sub bidang evaluasi dan pengendalian, dan sub koordinator data dan informasi;
- d. pengkoordinasian penyusunan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah; pengkoordinasian pengelolaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengembangan, koordinasi dan kerjasama pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pengkoordinasian dalam koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya;
- g. pengkoordinasian penyusunan bahan rancangan dan peraturan perundang-undangan;
- h. pengkoordinasian fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP);
- i. pengkoordinasian evaluasi dan pengendalian terhadap

- piutang dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pengkoordinasian penyusunan rencana tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pengkoordinasian penyusunan laporan pendapatan daerah;
- l. pengkoordinasian pengelolaan, pemanfaatan, informasi dan dokumentasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. pengkoordinasian pelayanan retribusi daerah;
- n. pengkoordinasian pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi manajemen pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan,

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang penagihan dan pemeriksaan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang Penagihan dan pemeriksaan; sub bidang Penagihan, Sub Bidang Pemeriksaan dan Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang pajak daerah;
- e. pemberian pembatalan, penghapusan, pembetulan

- keringanan, keberatan, pengurangan dan kelebihan pembayaran pajak daerah; pengelolaan Penagihan Pajak Daerah;
- f. pengkoordinasian pemeriksaan terhadap wajib pajak, tujuan pengujian kepatuhan dan tujuan lainnya;
 - g. pengkoordinasian kertas kerja, laporan dan pengajuan rekomendasi hasil pemeriksaan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pendataan dan Penetapan

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Pendataan dan Penetapan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pendataan dan penetapan;
- b. pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pendataan dan penetapan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang pendataan dan penetapan; sub bidang pelayanan dan pendataan, sub bidang penetapan dan sub koordinator verifikasi;
- d. pengkoordinasian pengelolaan Pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu NPWPD;
- g. pengkoordinasian penunjukan dan pengukuhan Wajib pungut, Wajib Pajak dan Surat Keterangan NJOP;

- h. pengkoordinasian penerbitan nota perhitungan, penetapan, pencetakan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- i. pengkoordinasian verifikasi dokumen hasil pengajuan dari wajib pajak;
- j. pengkoordinasian verifikasi lapangan yang berkaitan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- k. pengkoordinasian penetapan keabsahan hasil verifikasi lapangan;
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

A. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran Strategis Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dicapai melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan 14 Sub Kegiatan sebagai penunjang peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Capaian sampai dengan Triwulan II dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 s.d Triwulan II

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4
PAJAK DAERAH	Rp 299.197.000.000	Rp 150.282.160.505	50,23
RETRIBUSI DAERAH	Rp 356.883.422.846	Rp 155.932.932.829	43,69
JUMLAH	Rp656.080.422.846	Rp 306.215.093.334	46,67

Tabel 2.2
Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi *)	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	4,73%	46,67	2,21

*) data 2024 sampai dengan Triwulan II.

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 1 kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.930.718.600 dengan realisasi sebesar Rp1.622.140.198 atau terserap 41,47%, pada triwulan II dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 terealisasi sebesar Rp. 9.980.000 atau 6,65%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 48.605.000 atau 24,30%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah

serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;

3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 62.000.000 terealisasi sebesar Rp. 26.416.000 atau 42,61%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Penyuluhan Pajak Daerah Melalui Video Edukasi Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 876.000.000 teralisasi sebesar Rp. 363.200.000 atau 41,46%. Hasil Keluaran kegiatan yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 15 unit;
5. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 266.430.600 teralisasi sebesar Rp. 134.705.000 atau 50,56%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Laporan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
6. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 488.000.000 teralisasi sebesar Rp. 262.540.000 atau 53,80%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen.
7. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000 terealisasi sebesar Rp. 91.247.000 atau 22,81%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
8. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi sebesar Rp. 47.526.000 atau 95,05%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Dokumen Laporan Pelayanan sebanyak 1 Dokumen;
9. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi sebesar Rp.21.420.000 atau 42,84%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi sebanyak 1 Dokumen;
10. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000 terealisasi sebesar Rp. 218.015.600 atau 48,45%.

Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;

11. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 77.288.000 terealisasi sebesar Rp. 38.427.600 atau 49,72%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
12. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000 terealisasi sebesar Rp. 248.460.400 atau 62,12%. Hasil keluaran yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
13. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 461.000.000 terealisasi sebesar Rp. 111.597.598 atau 24,21%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sebanyak 1 Dokumen.

Penunjang kegiatan dan beberapa sub kegiatan dengan rincian yaitu :

I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 49.210.000 terealisasi Rp.34.615.600 atau 70,34%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 terealisasi Rp. 15.219.000 atau 76,10%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 terealisasi Rp. 0 atau 0%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 terealisasi Rp. 12.722.000 atau 63,61%. Hasil Keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen;

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 terealisasi Rp. 0. Hasil keluaran kegiatan yaitu jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.38.426.800 terealisasi Rp. 20.223.800 atau 52,63%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 Dokumen;
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi Rp. 17.379.000 atau 34,76%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen;

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp. 18.991.820.220 teralisasi sebesar Rp. 4.687.703.960 atau 24,68%, dengan hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 60 orang/ bulan;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 27.000.000 terealisasi Rp. 10.828.000 atau 40,10%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebanyak 1 Dokumen.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 62.488.000 terealisasi Rp. 27.338.400 atau 43,75%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebanyak 1 Laporan.
4. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp 31.150.000 terealisasi

Rp.10.360.000 atau 33,26%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 Dokumen.

III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.996.600 terealisasi Rp. 2.900.600 atau 41,46%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 Dokumen
2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 22.480.000 terealisasi Rp. 9.725.000 atau 43,26%. Hasil Keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 dokumen.
3. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 17.676.800 terealisasi Rp. 6.665.000 atau 37,70%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 Laporan.

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 38.000.000 terealisasi Rp. 19.438.000 atau 51,15%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000 terealisasi Rp0 atau 0%. Hasil Keluaran sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 1 Dokumen;
3. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 49.600.000 terealisasi Rp. 20.456.000 atau 41,24%. Hasil keluaran sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 1 Dokumen;

4. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000 terealisasi Rp. 9.000.000 atau 36,00%. Hasil keluaran sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Dokumen.
5. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangengan anggaran sebesar Rp. 148.270.600 terealisasi Rp.0 Atau 0%. Hasil Keluaran yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 120 orang.

V. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.17.336.200 terealisasi Rp. 0 atau 0%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 31.720.000 terealisasi Rp. 0 atau 0%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 357.552.390 terealisasi Rp. 244.710.000 atau 68,44%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 182.509.000 terealisasi Rp.169.001.200 atau 92,60%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 74.900.000 terealisasi Rp.31.050.000 atau 41,46%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 1 dokumen;
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 19.825.000 terealisasi Rp. 6.800.000 atau 34,30%. Hasil

Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 1 Laporan;

7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 358.378.000 terealisasi Rp.88.096.912 atau 24,58%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 dokumen;
8. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 terealisasi Rp. 8.624.000 atau 28,75%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 1 dokumen;
9. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 348.000.000 terealisasi Rp. 187.700.000 atau 53,94%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 1 dokumen.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 374.000.000 terealisasi Rp.0 atau 0%. Hasil Keluaran Kegiatan
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 112.390.000 terealisasi Rp. 104.260.000 atau 92,77%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 72 Unit

VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 11.000.000 terealisasi Rp. 6.000.000 atau 54,55%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 Laporan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000 terealisasi Rp.208.205.161 atau 37,22%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah

Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 Laporan.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.729.169.200 terealisasi sebesar Rp.828.695.300 Atau 47,92% . Hasil keluaran yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Laporan.

VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 473.490.000 terealisasi Rp. 181.491.500 atau 38,33%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 28 unit;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 60.250.000 terealisasi Rp. 14.170.600 atau 23,52%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 25 unit;
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 0 terealisasi Rp. 0 atau 0 %. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 0 unit.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2024 s.d Tw.II

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan 2024 s.d TW.II			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d 2024 TW.II		
					Target	Realisasi *)	Tingkat realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11 = 10/4	
	Urusan Penunjang										
	Bidang Keuangan										
	52	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	53,23%	8,84%	4,73%	2,21%	46,72%	4,73%	15,78%	29,64
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	178,51	100%	6,65	6,65	100	285,16	57,03
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen	400%	220,44	100%	24,30	24,3	100	344,74	86,19
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan Pajak Daerah Melalui Video Edukasi Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	194,71	100%	42,61	42,61	100	337,32	67,46
	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 15 Unit	500%	242,93	100%	41,46	41,46	100	384,39	76,88
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	umlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	226,3	100%	50,56	50,56	100	376,86	75,37

				6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	225,6	100%	53,80	53,8	100	379,4	75,88
				7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		400%	193,79	0%	0	0	0	193,79	48,45
				8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	228,1	100%	22,81	22,81	100	350,91	70,18
				9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Dokumen Laporan Pelayanan 1 Dokumen	400%	288,05	100%	95,05	95,05	100	483,1	120,78
				10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen	400%	237,86	100%	42,84	42,84	100	380,7	95,18
				11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen	400%	250,54	100%	48,45	48,45	100	398,99	99,75
				12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen	400%	249,09	100%	49,72	49,72	100	398,81	99,70
				13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	500%	248,2	100%	62,12	62,12	100	410,32	82,06
				14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	500%	205,42	100%	24,21	24,21	100	329,63	65,93
				15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		400%	0	0	0	0	0	0	0,00

*) Realisasi s/d Triwulan II 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Target Kinerja SKPD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja SKPD 2021-2023 dan proyeksi 2024

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023*)	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	20%	-	16%	17,35%	16,30%	18%	Secara umum menunjukkan kenaikan. Walaupun untuk beberapa item, agak sulit untuk menentukan target yang hendak dicapai karena terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah di luar BAPENDA dan Menunjukkan kinerja perpajakan. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Rasio PAD)	100	-	106%	107,54%	100,13%	100%	Menunjukkan kinerja perpajakan. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan

*) sampai dengan Triwulan IV 2023

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah digambarkan dengan persentase kenaikan Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terus meningkatkan inovasi yaitu GEBYAR SIPENYU. Beberapa kegiatan di dalamnya yaitu:

1. PADA NIKAH YA (Penyepadanan NIK, NOP Objek Tanah dan Lainnya)
2. SMART BAPENDA (Sistem Manajemen Aplikasi Masyarakat Terpadu Badan Pendapatan Daerah)
3. PASTEL ISI (Pasar Pelayanan Pajak Teladan Terintegrasi)
4. SIPENYU (Retribusi dan Pajak Edisi Nyabet Untung)
5. SATGAS PAD

Realisasi PAD terhadap Target PAD menunjukkan kinerja untuk memenuhi target penerimaan PAD. Segala upaya, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi target yang telah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	<p>Kekuatan</p> <p>Faktor Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki regulasi Pendapatan Asli Daerah Memiliki Proses Bisnis dan SOP dalam pelaksanaan kegiatan Memiliki dokumen perencanaan jangka Panjang, menengah dan pendek dalam melaksanakan kegiatan Memiliki ASN yang mendukung pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan Bapenda Aplikasi yang mendukung pelayanan dan penatausahaan pendapatan daerah 	<p>Kelemahan</p> <p>Faktor Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran peningkatan pendapatan dan pelayanan perpajakan Belum optimalnya kapasitas ASN dalam memenuhi kebutuhan Lembaga sesuai dengan kapasitasnya Belum optimalnya pemutakhiran data potensial secara berkala Belum optimalnya pegawai sesuai kompetensi Minimnya pelayanan yang dekat dengan masyarakat sehingga kepatuhan wajib pajak belum optimal
Faktor Eksternal	<p>Faktor Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> Banyaknya potensi Pendapatan Kabupaten Sukabumi yang dapat dijadikan sumber pendapatan Dukungan dari Wajib Pajak, APH, Perangkat Daerah Penerima Pendapatan, dan Pemungut Pajak Wilayah dalam rangka pelaksanaan kepatuhan pajak. 	<p>Faktor Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemutakhiran data potensi pendapatan daerah secara berkala Belum maksimalnya pelayanan yang diharapkan Wajib Pajak Belum optimalnya komunikasi yang terstruktur antar desa, kecamatan dan Lembaga
Peluang	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas SDM dalam upaya untuk mengerti potensi pendapatan daerah. Pengembangan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pengembangan berbagai program dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pemungut pajak. Pemutakhiran data potensi pajak secara berkala 	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerja sama dengan Lembaga lain dalam rangka meningkatkan kapasitas ASN Kerja sama dengan DKIP terkait pengamanan aplikasi data dan informasi

Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Ketidapatuhan Wajib Pajak 2. Ketidapatuhan Pemungut Pajak 3. Ketidakakuratan data wajib pajak 4. Penyalahgunaan data oleh peretas data 5. Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak sesuai	1. Peningkatan Kerjasama dengan para APH untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 2. Kerjasama dengan Auditor (Inspektorat) dalam rangka meminimalisir resiko pelayanan dan pelaksanaan kegiatan 3. Pendataan yang berkelanjutan dalam upaya pemutakhiran data 4. Regulasi pengamanan terkait data dan informasi 5. Peningkatan pemeriksaan dan verifikasi lapangan	1. Penyusunan SOP dalam setiap kegiatan 2. Peningkatan Sosialisasi perpajakan 3. Penyusunan data potensi secara berkala 4. Penetapan Funishment dalam rangka mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak 5. Peningkatan kualitas pegawai

Masih terdapatnya beberapa permasalahan dan hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA, diantaranya:

- Belum optimalnya pemutakhiran data potensi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
- Sering terjadinya perubahan regulasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
- Belum optimalnya fasilitas pelayanan pajak daerah
- Belum maksimalnya pengelolaan dan penggalian potensi Retribusi Daerah
- Ketidapatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pungut dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- Kurangnya Sarana Infrastruktur TIK dalam meningkatkan efesiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan

Adapun upaya dalam menyelesaikan permasalahan dan hambatan dengan melakukan:

- Melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Meningkatkan sosialisasi pajak dan retribusi agar mengerti pentingnya pendapatan bagi Pembangunan dan merasakan manfaatnya.
- Menyediakan kendaraan operasional pelayanan dan menambah outlet pelayanan yang memadai

- Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholders agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD
- Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholders agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Lampiran Gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Pagu per Program/Kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program/Kegiatan	Pagu (000)	Program	Pagu (000)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.571.255.168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.571.255.168
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.737.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.737.200
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.773.516.308	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.773.516.308
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.153.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.153.400
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	267.870.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	267.870.600
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.579.288.460	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.579.288.460
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	638.340.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	638.340.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.190.169.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.190.169.200
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.180.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.180.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.911.449.600	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.911.449.600
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.911.449.600	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.911.449.600
	Total	30.482.704.768		30.482.704.768

Tidak terdapat selisih antara RKPD dengan hasil analisa kebutuhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak terdapat kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di BAPENDA Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.6
Usulan Program/ Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2024 Perubahan

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
–	–	–	–	–	–

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2026 harus sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sukabumi yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius, Maju dan Inovatif menuju masyarakat yang sejahtera lahir batin.”* Adapun Tugas dan Fungsi BAPENDA yaitu:

a. Tugas

Yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan Daerah

b. Fungsi

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang Penagihan dan Pemeriksaan ; Bidang Perencanaan dan Pengendalian.
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang Penagihan dan Pemeriksaan ; Bidang Perencanaan dan Pengendalian.; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
4. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang Penagihan dan Pemeriksaan ; Bidang Perencanaan dan Pengendalian.; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
5. pembinaan Administrasi di Lingkungan Badan.
6. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah;
7. pembinaan pelayanan publik di lingkungan Badan pendapatan Daerah;
8. pembinaan terhadap pengelola pendapatan asli daerah dan wajib pajak;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis, berasal dari rumusan misi yang memberikan kerangka arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi. Akan tetapi terkendala dengan :

1. Rendahnya Optimalisasi Pendapatan
2. Rendahnya data potensi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah dalam rangka peningkatan kemandirian fiscal
3. Rendahnya proporsi PAD terhadap upaya kemandirian Kabupaten Sukabumi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan memenuhi kriteria SMART (*Specific Measurable Accountable Result-oriented Time-bound*). Adapun penjelasan dari kriteria SMART yaitu :

1. *Spesific* yaitu Terperinci
2. *Measurable* yaitu Terukur
3. *Accountable* yaitu Dapat Dipertanggungjawabkan
4. *Result oriented* yaitu Berorientasi Pada Tujuan
5. *Time Bound* yaitu Pada Periode Tertentu

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi dan Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi dan Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran BAPENDA

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya Pajak daerah dan Retribusi daerah

Sumber: RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan strategi dan kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Strategi dan Kebijakan BAPENDA

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Meningkatnya Pajak daerah dan Retribusi daerah	Memperkuat dan mengembangkan ekstensifikasi dan intensifikasi penggalan potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah serta Sumber-Sumber Penerimaan Daerah dengan memperkuat sdm dan penggunaan IT	a. menyusun dan membentuk regulasi dalam rangka optimalisasi peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah yang efektif b. Peningkatan SDM petugas pajak dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang Optimalisasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sukabumi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah, Program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang masuk sebagai PD penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan :

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sedangkan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat satu kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 15 Sub kegiatan yaitu :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
10. Penagihan Pajak Daerah;

11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
14. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Berikut penjelasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2024	APSD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							28.268.124.928,00	28.206.357.410,00	30.482.704.768,00	2.214.579.840,00								0,00	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							28.268.124.928,00	28.206.357.410,00	30.482.704.768,00	2.214.579.840,00								0,00	
		6.02 KEUANGAN							28.268.124.928,00	28.206.357.410,00	30.482.704.768,00	2.214.579.840,00								0,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	24.310.817.728,00	24.275.636.810,00	25.571.255.166,00	-24.310.817.728,00								0,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	213.720.000,00	217.636.800,00	222.737.200,00	9.017.200,00								0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	53.375.000,00	49.210.000,00	50.298.000,00	-3.077.000,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.345.000,00	38.426.800,00	40.489.200,00	10.144.200,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	51.950.000,00	1.950.000,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	18.352.917.528,00	18.112.458.220,00	19.773.516.308,00	1.420.598.780,00								0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	65 Orang/bulan	18.265.891.128,00	18.991.820.220,00	19.645.678.308,00	1.379.787.180,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.888.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-888.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	34.138.400,00	62.488.000,00	66.688.000,00	32.549.600,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	31.150.000,00	34.150.000,00	9.150.000,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 %	121.264.400,00	47.153.400,00	47.153.400,00	-74.111.000,00								0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.290.000,00	6.996.600,00	6.996.600,00	-3.293.400,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	69.444.400,00	22.480.000,00	22.480.000,00	-46.964.400,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	41.530.000,00	17.676.800,00	17.676.800,00	-23.853.200,00	Kab. Sukabumi, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	237.116.800,00	267.870.600,00	267.870.600,00	30.753.800,00			-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1	1	Dokumen	Dokumen	38.060.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-60.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1	1	Dokumen	Dokumen	6.322.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	678.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1	1	Dokumen	Dokumen	10.000.000,00	49.600.000,00	49.600.000,00	39.600.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1	5	Orang	Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				120	120	Orang	Orang	157.734.800,00	148.270.600,00	148.270.600,00	-9.464.200,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Umum Perangkat Daerah				-	100 %	1.198.908.200,00	1.420.220.590,00	1.579.288.460,00	380.380.260,00			-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	1	Paket	Paket	14.209.000,00	17.336.200,00	27.600.400,00	13.391.400,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0003		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan				1	1	Paket	Paket	30.914.200,00	31.720.000,00	31.720.000,00	805.800,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1	1	Paket	Paket	408.470.050,00	357.552.390,00	415.734.810,00	7.264.760,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1	1	Paket	Paket	236.911.400,00	182.509.000,00	213.130.250,00	-23.781.150,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1	1	Dokumen	Dokumen	17.500.000,00	74.900.000,00	134.900.000,00	117.400.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0008		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1	1	Laporan	Laporan	20.280.000,00	19.825.000,00	19.825.000,00	-455.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1	1	Laporan	Laporan	390.370.000,00	358.378.000,00	358.378.000,00	-31.992.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1	1	Dokumen	Dokumen	30.253.550,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-253.550,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1	1	Dokumen	Dokumen	50.000.000,00	348.000.000,00	348.000.000,00	298.000.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Fasilitas Perlatan dan Mesin Lainnya				-	100 %	1.355.090.000,00	486.390.000,00	638.340.000,00	-7.167.500,00			-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1	4	Unit	Unit	993.000.000,00	374.000.000,00	374.000.000,00	-619.000.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0006		Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0	27	Unit	Unit	362.090.000,00	112.390.000,00	264.340.000,00	-97.750.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	2.178.470.800,00	2.190.169.200,00	2.190.169.200,00	11.698.400,00			-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1	1	Laporan	Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENCANA TAHUN 2022	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	16			17	18		19	20	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024										
1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	550.100.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-100.100.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.617.370.800,00	1.729.169.200,00	1.729.169.200,00	111.798.400,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	653.330.000,00	633.740.000,00	862.180.000,00	198.850.000,00			-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertzinannya				28 Unit	8 Unit	555.310.000,00	473.490.000,00	632.830.000,00	77.520.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	48 Unit	98.020.000,00	60.250.000,00	60.250.000,00	-37.770.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	159.100.000,00	159.100.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	3.957.307.200,00	3.930.718.600,00	4.911.449.600,00	-3.957.307.200,00			-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				-	4,73 %	3.957.307.200,00	3.930.718.600,00	4.911.449.600,00	964.142.400,00			-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	74.546.000,00	24.546.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	248.363.000,00	200.000.000,00	296.000.000,00	7.617.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	147.237.000,00	62.000.000,00	112.000.000,00	-35.237.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Unit	20525 Unit	820.600.000,00	876.000.000,00	1.376.000.000,00	555.400.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	296.034.000,00	266.430.600,00	266.430.600,00	-29.603.400,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	645.000.000,00	488.000.000,00	488.000.000,00	-157.000.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	560.007.200,00	400.000.000,00	480.340.000,00	-79.667.200,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				0 Layanan	7200 Layanan	60.000.000,00	50.000.000,00	275.300.000,00	215.300.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	408.258.000,00	450.000.000,00	512.234.000,00	103.976.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	77.288.000,00	93.421.000,00	43.421.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110.788.000,00	400.000.000,00	496.178.000,00	385.390.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen							-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengeblasan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	511.000.000,00	461.000.000,00	431.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
J U M L A H									28.268.124.928,00	28.206.357.410,00	30.482.704.768,00	336.797.956.177,00							0,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 merupakan perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi. Disamping hal tersebut, Renja juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pada kegiatan lingkup BAPENDA Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi ini diharapkan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan Tahun 2024 dapat dijadikan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi agar sesuai dan saling bersinambungan sehingga dengan adanya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Palabuhanratu, Agustus 2024

KEPALA,



HERDY SOMANTRI SUBANDI, S.IP.,M.Si

Pembina ,IV/a

NIP. 19800425 200801 1 003